



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**UNIT KERJA** : RUMAH SAKIT MADANI PALU

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : NIRWANSYAH PARAMPASI
2. Jabatan : KEPALA RUMAH SAKIT MADANI PALU
3. NHK : 710678

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 277.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/141 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 183.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1701 m2/1701 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 816 m2/816 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 12320 m2/12320 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2142 m2/2142 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/420 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 3900 m2/3900 m2 di KAB / KOTA DONGGALA, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 216.000.000

1. MOTOR, HONDA SPACY SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
2. MOTOR, MIO FINO SEPEDA MOTOR Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
3. MOBIL, NEW AVANZA 36 M/T MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 4.000.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	497.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	497.000.000

---

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.